

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG DAYA  
SAING DAERAH DI DESA BUNTU KARYA  
KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri*

*Palopo*



**IAIN PALOPO**

Diajukan oleh

**RIKA SALMA**

(17 0401 0034)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG DAYA  
SAING DAERAH DI DESA BUNTU KARYA  
KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri*

*Palopo*



**IAIN PALOPO**

Diajukan oleh

**RIKA SALMA**

(17 0401 0034)

**Pembimbing:**

**Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Salma  
Nim : 17 0401 0034  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu"

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,



ng membuat pernyataan



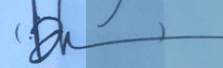
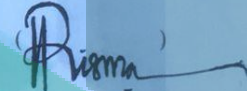

Rika salma

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Rika Salma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0034, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 Miladiyah bertepatan 4 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan Permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 14 Maret 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.                 | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.            | Penguji I         | (  ) |
| 4. Rismayanti, S.E., M.Si.                | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP.19790724 200312 1 002



Dr. Burhan, S.E., M.EI.  
NIP.19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهَا  
أَجْمَعِينَ. آمِينَ

Puji syukur peneliti panajtakan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu”** setelah melalui proses panjang.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahiliyan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang menderang yang di ridhoi Allah SWT, demi mewujudkan *Rahmatan lil ‘alamin*. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, dan bimbingan dari dosen pembimbing, walau skripsi inimasih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Abdul Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Dosen, beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam proses ini.
5. Hendra Syafri, S.E., M.M. selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
7. Seluruh informan penulis Kantor Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu beserta staf dan masyarakat yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis.
8. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta ayahanda Abdul Hamid dan ibunda Jumiaty, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh

kasihsayang sejakkecil hingga sekarang, senantiasa memberikan semangat dan segalanya kepada penulis. Beserta seluruh keluarga yang telah memberikan doa. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Terkhusus sahabat seperjuanganku Hasliana, Satriani, Sri Reski Oktari, Hasdiana, Aisyah, Riska Handayani, Muhammad Marzuki, A.Muh Harun, Ari Anggara, Ahmad Nasaruddinyang telah membantu penulis dalam proses ini yang selalu membersamai penulis dalam suka duka, dan selalu memberikan Support kepada penulis.
10. Kepada seluruh teman teman program studi ekonomi syariah khususnya Ekis A yang sudah membantu dan memberikan support kepada penulis.
11. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sampai tahap ini, bertahan dengan keadaan, dan semoga ini awal dari perjuanganku.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Palopo, 20 Februari 2022

Rika Salma

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
---	-----	---	-----



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau haikiat, transliterasi ya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

## 3. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjainā
الْحَقَّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُوَّ	: 'aduwwun

Jika huruf ّber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

*dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Sw. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

SWOT : *Strenght, Weaknesse, Opportunity, Threats*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKTATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL/GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Efektivitas.....	14
2. Pelaksanaan.....	17
3. Infrastruktur.....	19
4. Pembangunan Desa.....	20
5. Daya Saing Daerah.....	23
C. Kerangka Pikir.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

A.	Jenis Penelitian .....	29
B.	Fokus Penelitian .....	30
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
D.	Data dan Sumber Data .....	30
E.	Instrumen Penelitian .....	31
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
G.	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36
H.	Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Deskripsi Data .....	40
1.	Gambaran Umum Desa Buntu Karya .....	40
2.	Perencanaan Pembangunan .....	46
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
1.	Hasil Wawancara .....	47
2.	Pembahasan .....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>76</b>
<b>Lampiran</b>	.....	

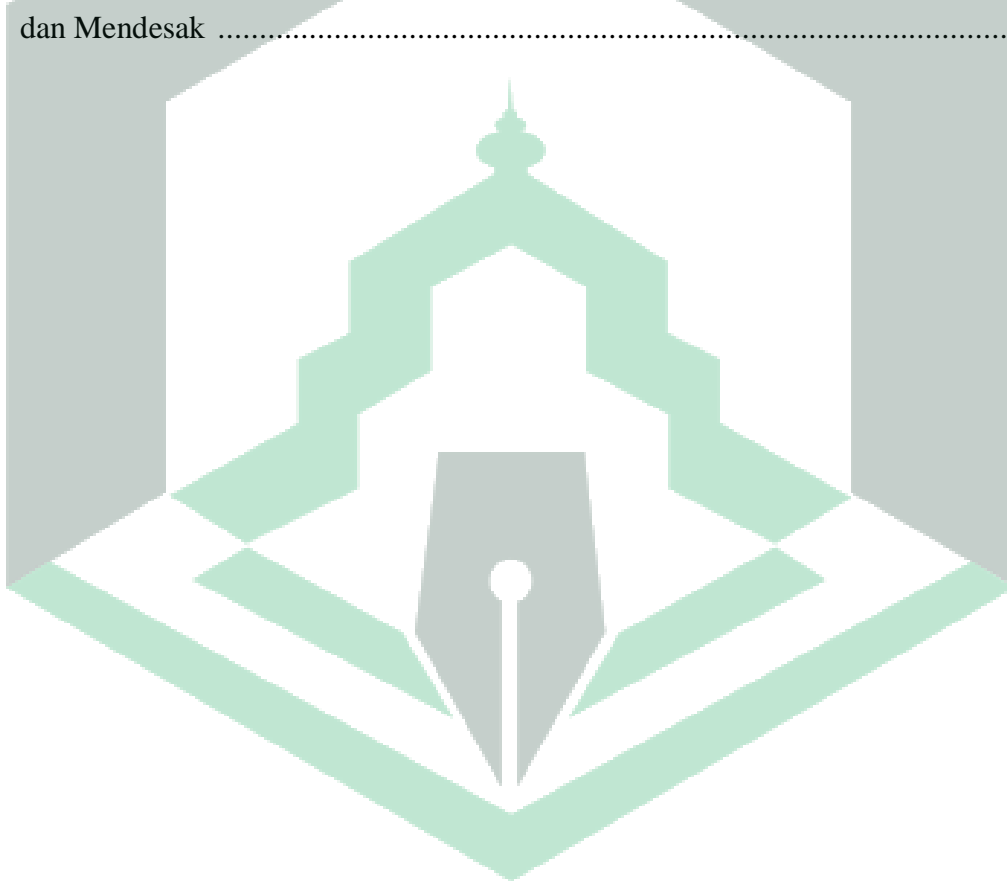
## DAFTAR AYAT

Q.S Al Imran 159 .....	4
Q.S Sad 26.....	5



## DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Fikir .....	26
Tabel 4.1 Periode Kepala Desa Buntu Karya 1985-2021 .....	42
Tabel 4.2 Batas-batas Desa Buntu Karya.....	43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Buntu Karya 2021 .....	44
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Karya 2021 .....	45
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Buntu Karya .....	46
Tabel 4.6 Program Pembangunan Infrastruktur T.A 2020-2021.....	63
Tabel 4.7 APBD Desa Buntu Karya Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak .....	68



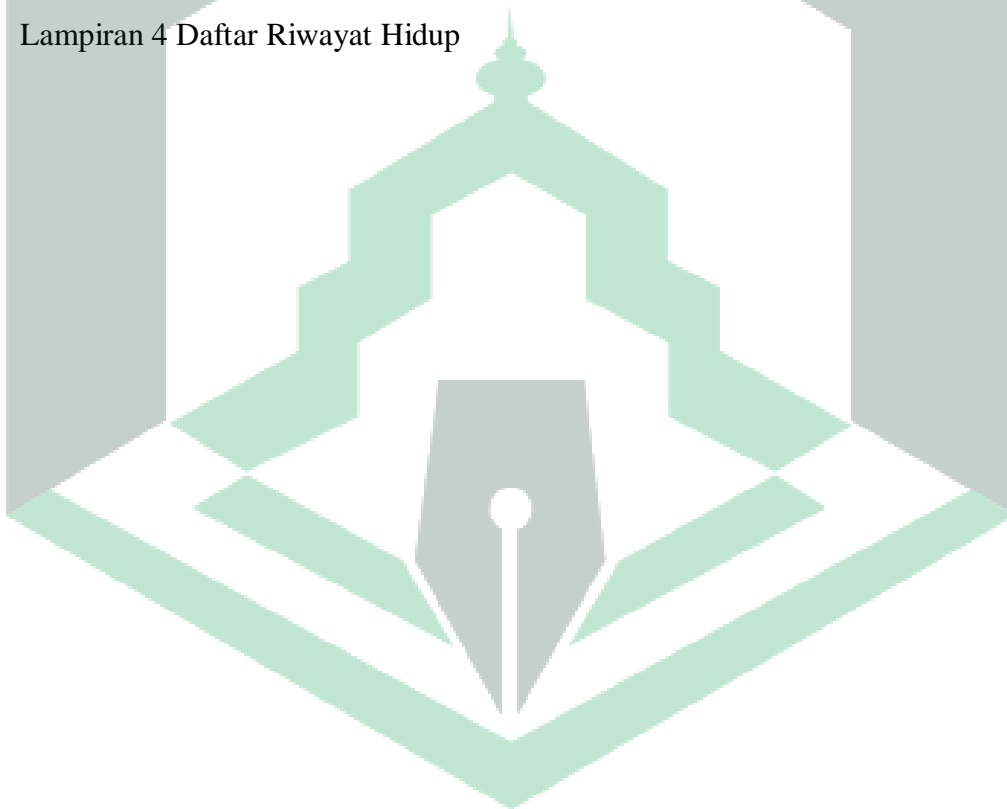
## LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Rika Salma.,** 2021. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu:.* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Ahmad Syarief Iskandar.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang daya saing daerah di desa Buntu Karya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik antara lain, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, aparat Desa dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Dilihat dari indikator Pencapaian Tujuan efektivitas program pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Buntu Karya dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tentunya sudah tepat di desa Buntu Karya, adapun program tersebut yaitu pembangunan jalan tani, pembangunan saluran irigasi tersier dan pembangunan plat dekker. (2) Dilihat dari indikator integrasi dapat tercapai dengan mensosialisasikan program pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Buntu Karya dilaksanakan dengan baik dan benar serta masyarakat tertarik mengingat pelaksanaan program tersebut untuk pembangunan desa Buntu Karya dan juga untuk kemajuan desa Buntu Karya. (3) Dilihat dari indikator adaptasi yaitu dimulai dari tahap perencanaan program sampai tahap pelaksanaan program pembangunan sangat melibatkan peran penting masyarakat, kemudian manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan daya saing daerah dengan perbaikan sarana dan prasarana untuk membangun kegiatan ekonomi yang lebih baik lagi dengan kondisi jalan memadai, pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan dari hasil pertanian.

**Kata kunci: Efektivitas, Infrastruktur Desa, Pembangunan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan adalah sebuah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.<sup>1</sup> Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>2</sup>

Menurut Stone infrastruktur adalah berbagai macam fasilitas fisik yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintah dalam hal tenaga listrik, penyediaan air bersih, transportasi, pembangunan limbah dan pelayanan-pelayanan lainnya yang sama.<sup>3</sup>

Daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasional. Pengertian mencakup wilayah yang cukup luas seperti pulau atau provinsi, atau wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten/kota. Departemen perdagangan dan industri inggris (UK-DTI) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja

---

<sup>1</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2010), 1

<sup>2</sup> Sondang P. Siagian *Fungsi-Fungsi Manajerial*. (Rineka Cipta: Jakarta 2002), 31.

<sup>3</sup> Mega Lestari, Suhadak, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 70, NO. 1, 2019, 100. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/2819/3205>

yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Pasal 1 Ayat 23 menjelaskan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi.<sup>5</sup> Namun perkembangan zaman yang makin pesat sehingga membuat pemerintah memberikan suatu inovasi untuk memberikan peluang untuk masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup melalui kreativitas mereka sendiri.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat dipedesaan. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong. Selanjutnya pasal 82 Undang-Undang desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan

---

<sup>4</sup> Sukanto, "Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016): 57-58 <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/download/4879/2626>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Pasal 1 Ayat 23



permusyawaratan desa, pemerintah desa wajib memenginformasikan perencanaan dan pelaksana rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kinerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit (satu) tahun sekali, masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.<sup>6</sup>

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dan tertinggal perlu diorganisir sebaik mungkin. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 desa merupakan “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>7</sup>

Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa. Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota<sup>8</sup>. Landasan digunakannya

---

<sup>6</sup> Yulani Marengokonda, Welson Y.Rompas dan Rully Mambo, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/23832/234582>

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintah, yang berorientasi pada pengambilan harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayanan yang adil. *Governance* merupakan pengaturan, yang dalam konteks *Good Governance* ada yang menyebut kata pamong.

Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat beragam atau bervariasi antara desa satu dengan desa lainnya. Keberagamannya dapat dilihat dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, maupun sumber daya manusianya (SDM) sendiri. Beberapa perbedaan desa diantaranya ada desa yang potensial, ada yang memiliki jumlah penduduk yang sangat kurang, infrastruktur yang kurang memadai, tingkat pendapatan rendah, letak geografis yang jauh dari ibu kota Kabupaten/Kecamatan, dan beberapa keadaan lainnya.

Penyelenggaraan pembangunan Desa dalam masyarakat atau pemerintah yang terkait haruslah memperhatikan hukum pemerintahannya dalam Islam, agar tercapai suatu penyelenggaraan pembangunan Desa serta pemerintahan Desa yang baik dan juga sejalan dengan anjuran agama Islam. Berdasarkan dalam ayat Al-Qur'an dapat ditemukan tentang beberapa nilai dengan konsep syura.

Ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an Q.S Ali Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Terjemahnya:

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahan, Alqur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum penyelenggaraan pemerintah itu haruslah sesuai dengan kepentingan serta keputusan bersama dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan umum, meninggalkan yang tidak berguna sebagai alat tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu pemerintahan yang transparansi dalam Desa harus ditumbuhkan sebagai dasar suatu pemerintahan yang baik.

Dari hal ini kita melihat betapa pentingnya peran pemimpin dalam mengatur segala hal yang menjadi tanggungjawabnya. Dapat dilihat pada QS. Sad 38:26

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ  
الْحِسَابِ

Terjemahnya:

*“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena menyesatkan engkau di jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.”(QS. Sad:26)<sup>10</sup>*

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya khususnya pemerintah daerah kabupaten Luwu dapat mengambil kebijakan yang lebih terarah. Ajaran Islam, telah banyak dijelaskan

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahan, Alqur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.<sup>11</sup>

Desa Buntu Karya adalah salah satu Desa yang secara administratif merupakan bagian dari kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat telah menerima bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui pemerintah Desa Buntu Karya. Dana Desa yang kemudian semestinya diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Mayoritas pekerjaan yang ada di desa Buntu Karya yaitu sebagian besar bermata pencaharian ekonominya terletak pada sawah dan kebun. Tentunya dalam menjalani sosial ekonominya, desa ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan, dan tentunya pada akses jalan yang memadai yang mengangkut hasil pencaharian mereka. Ini sangat perlu sebagai bahan pertimbangan pemerintah Desa Buntu Karya dalam merealisasikan program-program yang bersifat penting demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Jika hal ini terus menerus berlanjut tentu akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian warga dan tidak mampu bersaing dengan desa-desa yang lain untuk memajukan Desanya sendiri. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, namun pada kenyataannya para masyarakat di Desa Buntu Karya sejauh ini kurang memperhatikan dengan

---

<sup>11</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), 2.

permasalahan ini, kurang menyuarakan suara mereka kepada pihak pemerintah setempat.

Yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah permasalahan sarana infrastruktur yang ada di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu diantaranya masih memiliki permasalahan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya sosialisasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa keadaan jalan Desa yang tidak dilakukan perbaikan. Selain dari pada itu, permasalahan yang membuat pembangunan infrastruktur tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya perawatan baik dari pemerintah desa beserta masyarakat akan hal pembangunan yang hanya berpatokan pada jangka pendek saja tidak melihat jangka panjang yang ada. Dengan demikian dari pembangunan infrastruktur tersebut, apakah Desa Buntu Karya mampu bersaing dengan desa yang lain dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik?

Dilihat dari masalah di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dan perlu diamati mengenai efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang daya saing daerah di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, sehingga saya tertarik untuk mengangkat judul ***“Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu”***.

#### ***B. Batasan Masalah***

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Efektivitas dan Kendala yang dialami pada saat Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### ***D. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Daya Saing Daerah di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pembangunan ilmu pengetahuan khususnya tentang efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa, serta bagi peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan baik mahasiswa maupun para dosen.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini sebagai berikut.

1. Jesika Watung (2021) dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Kayuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa". Hasil penelitiannya adalah efektivitas program pembangunan infrastruktur perdesaan di desa Kayuwi1 kecamatan Kawangkoan Barat ditinjau dari 5 indikator, yaitu menunjukkan ketepatan kebijakan yang sesuai masalah di masyarakatnya. Ketepatan pelaksanaan sudah terkoordinasi baik dari pusat sampai desanya. Ketepatan sasaran program yang tertuju pada penyediaan infrastruktur bagi masyarakat miskin, hampir miskin, kaum perempuan, dan minoritas. Ketepatan proses yang berjalan baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengambilan keputusan. Ketepatan lingkungan dinilai positif oleh masyarakat terutama dalam pelaksanaan program PPIP.<sup>12</sup>

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian serta sama-sama membahas tentang

---

<sup>12</sup> Jesika Watung, Wilson Y.Rompas dan Deisi Tampongangoy, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Kayuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*, JAP.No.107,(vol.VII),2021.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35065/32947>



pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa. Hanya saja penelitian ini berbeda lokasi dan tidak membahas daya saing daerah.

2. Ayu Rosita (2021) dengan judul "**Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe)**". Hasil penelitiannya adalah program pembangunan infrastruktur Pedesaan di desa Tapong jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah desa. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.<sup>13</sup>

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang akan digunakan serta sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur desa. Hanya saja penelitian diatas lebih kepada efektivitas pelaksanaan program infrastruktur desa.

3. Tiyas Febriyanti (2021) dengan judul "**Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyarah**". Penelitian ini menghasilkan 2 kesimpulan yaitu, 1) penerapan asas kepentingan umum sudah sesuai namun belum

---

<sup>13</sup> Ayu Rosita, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. [https://dgilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full\\_Text.pdf](https://dgilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full_Text.pdf)

maksimal dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan upaya penerapan asas tertib kepentingan umum harus mencakup aspirasi, akomodatif dan selektif dalam pembangunan desa. 2) Berdasarkan dalam pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan asas tertib kepentingan umum haruslah merujuk kepada kemaslahatan umum serta mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan khusus. Melaksanakan kemaslahatan umat dengan cara melaksanakan asas tertib kepentingan umum dimana sebelum menentukan pembangunan haruslah mengutamakan konsep syura atau musyawarah, keadilan, dan tidak bertentangan dengan penetapan aturan dalam melaksanakan pembangunan.<sup>14</sup>

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang akan digunakan serta sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur. Hanya saja dalam penelitian ini lebih berfokus pada Asas Tertib Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Anda Pratama (2019) dengan judul "**Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir**". Hasil dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan (1) pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning

---

<sup>14</sup> Tiyas Febriyanti, *Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.  
<http://repository.radenintan.ac.id/14018/2/PERPUS%20%PUSAT.pdf>

Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan menggunakan Transparansi RPJMD pemerintah membuka informasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga pengawasan dalam pembangunan infrastruktur desa Tuk Jimun dan pelaksanaan melakukan Evaluasi RPJMD; (2) terdapat dua kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya; minimnya keterlibatan masyarakat, kemampuan SDM yang terbatas yang rendahnya partisipasi masyarakat dalam RPJMD; (3) terdapat dua upaya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya mengajak partisipasi masyarakat dan penegakan disiplin kinerja dan mengikuti pelatihan di kecamatan.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian yang akan digunakan serta sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur. Hanya saja dalam penelitian ini lebih terfokus pada evaluasi RPJM Desa.

5. Giffried R. Rumpia, Burhanuddin Kiay, Helly F. Kolondam (2019) dengan judul "**Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara)**". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan

---

<sup>15</sup> Anda Pratama, "*Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir*" (Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah), (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). [http://repository.uinjambi.ac.id/1823/1/SIP151926\\_ANDA%20PRATAMA\\_IP%20-%20Rizal%20muhammad.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/1823/1/SIP151926_ANDA%20PRATAMA_IP%20-%20Rizal%20muhammad.pdf)

Infrastruktur Perdesaan Di Desa Bulude jika dilihat dari indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran dan untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah desa dan indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

Persamaan dari penelitian ini yaitu mengarah pada pokok penelitian yang sama serta metode yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Sumaryadi dalam Lenny Aprianingsih Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.<sup>16</sup>

Adapun kriteria mengenai ukuran pencapaian efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

---

<sup>16</sup> Lenny Aprianingsih, *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan (Studi Pada Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. <http://repository.ummat.ac.id/1784/4/COVER-BAB%20III.pdf>

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai tujuan sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat karena apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.

Steers mengatakan bahwa “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Teori di atas diperkuat oleh Martani Huseini (1987) yang menyatakan bahwa:

“Pendekatan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa datang., sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi yang baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi atau sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi.

Menurut Richard M. Steers pada buku yang berjudul “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan bahwa ada 3 (tiga) indikator efektivitas, sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Pencapaian Tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

---

<sup>17</sup>Richard M. Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Erlangga.

- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pembangunan consensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan beberapa indikator ukuran efektivitas yang dikemukakan diatas maka penelitian ini menggunakan teori ukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Strees dalam Tangkilisan yaitu: pencapaian Tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa tersebut dalam menunjang daya saing daerah.

## 2. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.<sup>18</sup>

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian

---

<sup>18</sup> Ayu Rosita, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. [https://dgilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full\\_Text.pdf](https://dgilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full_Text.pdf)

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di sampaikan;

- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tat aliran dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas dipandang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan antara faktor tersebut. Selain itu dalam proses implementasi terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.



### 3. Infrastruktur

Menurut Fakih pembangunan yaitu “proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Effendi pembangunan adalah “Suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Kemudian menurut Suryono “Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan”.<sup>19</sup>

Definisi infrastruktur menurut Fox, “*those services derived from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and to allow for household consumption*” dimana layanan yang berasal dari rangkaian umum yang secara tradisional di dukung oleh sektor publik untuk meningkatkan produksi sektor swasta dan memungkinkan konsumsi rumah tangga. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Selanjutnya Vaughn and Pollard, mendefinisikan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, Bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Endah Puji, DKK, *Op. Cit.* hlm.801

<sup>20</sup> Rr Lulus Prapti NSS, “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Ekonomi Rakyat*”, (Semarang: J. Dinamika Sosbud). Vol 17, No. 2. 84. <https://journal2.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/505/307>

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi *oxford dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energy) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.<sup>21</sup> Dari beberapa diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur secara menyeluruh meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan publik untuk menunjang serta mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat di suatu daerah.

#### 4. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 tentang Desa dijelaskan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata Swadesi bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bangunan yang mandiri dan otonom.<sup>22</sup> Istilah Desa dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga mempunyai sistem pemerintahan

---

<sup>21</sup> Sulistijo S M, Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: Kencana, 2015),1

<sup>22</sup> PJZoedmulder Bekerja Sama Dengan S.O.Robson, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 212

sendiri.<sup>23</sup> Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Menurut Mashuri Maschab,<sup>24</sup> Desa sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, diantara mereka saling mengenal dengan baik dan mereka *relative homogeny*, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan suatu lingkungan ekonomis, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

*Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah Negara.

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 226.

<sup>24</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Polgov, Fisipol Ugm, Yogyakarta, 2013, h. 1-2.

Menurut Bintaro, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, dan kultur yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.<sup>25</sup>

Segi geografis mendefinisikan Desa sebagai suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.<sup>26</sup>

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>27</sup>

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan Desa memiliki arti strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4.

<sup>26</sup> Bintaro R, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1983), h. 15

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>28</sup> DidikG. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 7.

## 5. Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan Negara. Selanjutnya Konsep tersebut dikembangkan untuk tingkat Negara sebagai daya saing global, khususnya sebagai lembaga World Economic Forum (Global Competitiveness Report) dan International Institute for Management Development (World Competitiveness Yearbook). Daya saing ekonomi suatu Negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah.

Menurut Bank Indonesia mengatakan bahwa:

“Daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”<sup>29</sup>

Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian terdahulu.

Keunggulan bersaing yaitu kegiatan tertentu yang diciptakan oleh individu, organisasi, kantor atau pesaing. Dominan keunggulan bersaing menurut Agus Rahayu bahwa:

“Keunggulan adalah kedudukan situasi keseluruhan dari asosiasi, sebagai asosiasi atau seluruh asosiasi dalam suatu industri atau situasi umum dari seorang

---

<sup>29</sup> Juma'in, *Panduan Indeks Daya Saing Daerah*, (Jakarta, 2020), h. 11.

individu sebagai pionir untuk pionir yang berbeda. Menurut sudut pandang pasar, posisi keseluruhan ini sebagian besar disukai oleh harga diri klien. Untuk sementara, dari sudut pandang asosiasi/yayasan, posisi keseluruhan ini sebagian besar diidentikkan dengan pelaksanaan hirarki/kelembagaan yang lebih baik atau lebih tinggi”.<sup>30</sup>

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan dalam mengukur keberhasilan pembangunan melalui daya saing suatu wilayah menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang berusaha berkompetisi untuk meningkatkan standar hidup masing-masing daerah.<sup>31</sup>

Faktor-faktor pembentuk daya saing daerah antara lain:<sup>32</sup> Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya menetapkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:

- 1) Perekonomian daerah
- 2) Keterbukaan
- 3) Sistem keuangan
- 4) Infrastruktur dan sumber daya alam
- 5) Ilmu pengetahuan dan teknologi

<sup>30</sup>Agus Rahayu, *Strategi Meraih Keunggulan dalam Industri Jasa Pendidikan (Suatu Kajian Manajemen Strategik)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 66.

<sup>31</sup>Kemas Ahmad Affandi, *Upaya Mengukur Daya Saing Wilayah melalui Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, *Jurnal Ilmiah*, Vol.20 No.1. (Februari, 2020), 296.

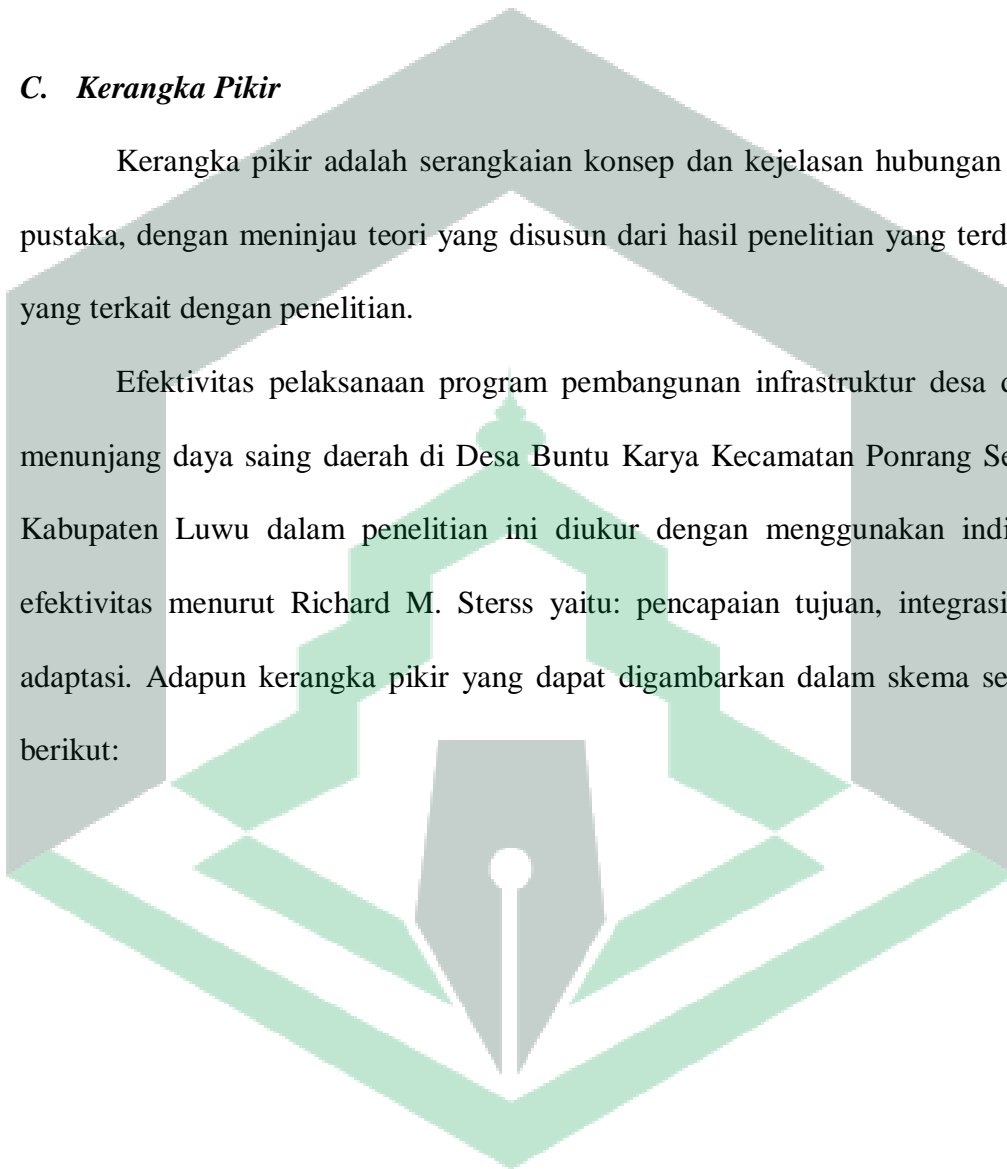
<sup>32</sup>Juma'in, *Panduan Indeks Daya Saing Daerah*, (Jakarta, 2020) 11-12.

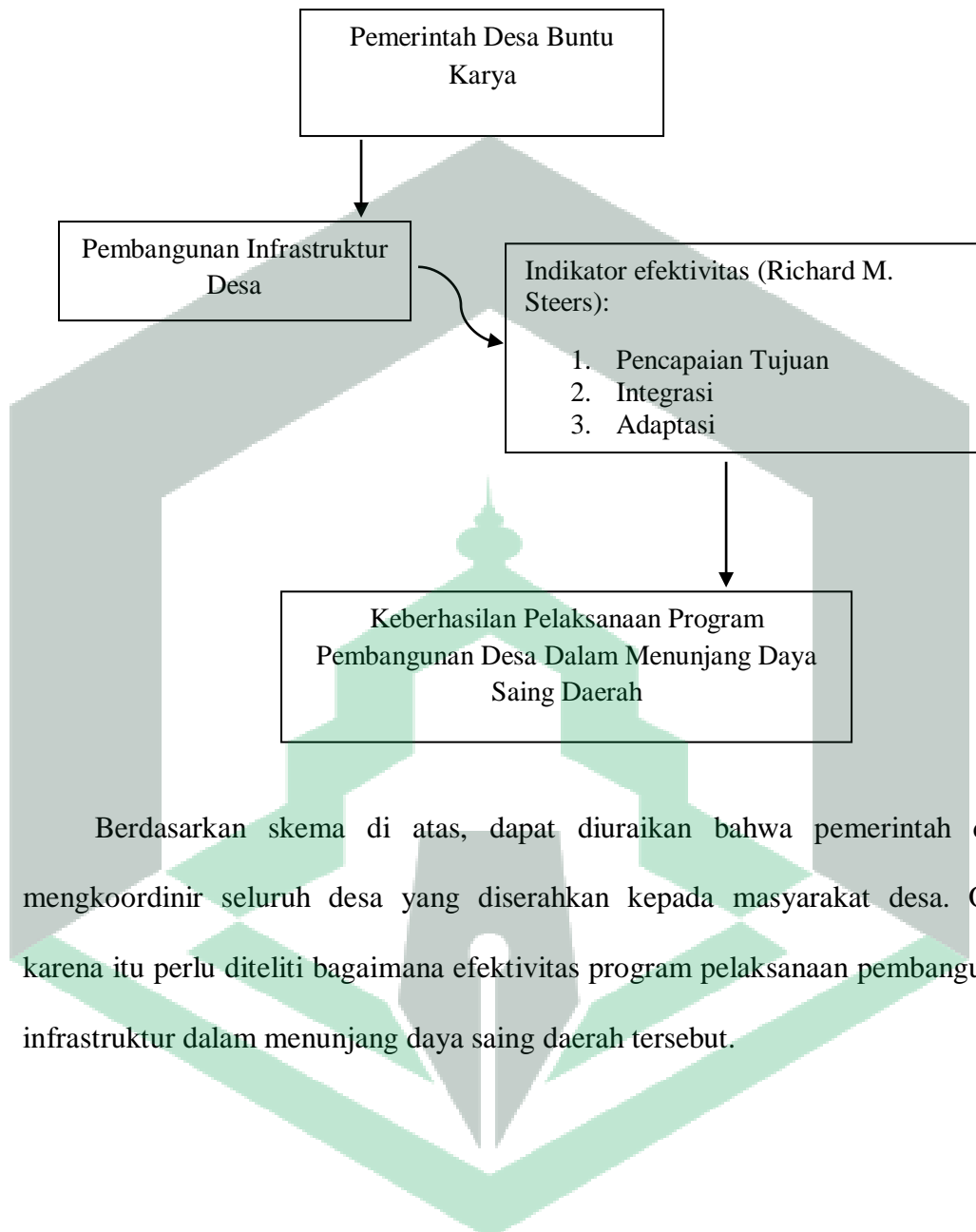
- 6) Sumber daya manusia
- 7) Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
- 8) Manajemen ekonomi mikro.

### ***C. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dari hasil penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian.

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang daya saing daerah di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Richard M. Sterss yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun kerangka pikir yang dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Berdasarkan skema di atas, dapat diuraikan bahwa pemerintah desa mengkoordinir seluruh desa yang diserahkan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana efektivitas program pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam menunjang daya saing daerah tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif.<sup>33</sup> Dimana penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, penentuan informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, selanjutnya alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif, dan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, data yang diteliti adalah data berupa pelaksanaan maupun penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Desa, dikuatkan dengan wawancara terhadap pihak yang terkait sebagai informan atau responden dari pertanyaan peneliti berikan. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan penulis mencari juga data dari skripsi, jurnal, serta buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian penjelasan yang disebut data sekunder.

---

<sup>33</sup> Joyesi Nopita, “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Prdesaan (PPIP) Di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”, 258. <http://www.journal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/download/1259/866>

## ***B. Fokus penelitian***

Fokus pada penelitian kualitatif ini di desa Buntu Karya kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa untuk menunjang daya saing daerah di desa Buntu Karya.

## ***C. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan latihan penelitian untuk memperoleh informasi dasar. Lokasi penelitian berorientasi ke arah desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Selain itu, lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih mudah melakukan penelitian.

Penelitian diadakan di Desa Buntu Karya kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Penelitian ini diadakan pada tanggal 05 Maret 2021.

## ***D. Data dan Sumber Data***

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang akan ada pada penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu suatu data penelitian yang diberikan oleh atau bersumber secara langsung dari objek penelitian maupun yang dikumpulkan dari wawancara.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah sebanyak 6 (enam) orang yang dijadikan sampel, yakni kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan dan umum, kepala dusun serta dua

---

<sup>34</sup> Winarno Surachman, *Desain Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1997), 125

masyarakat atau pun tokoh masyarakat Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

## 2. Informasi/Subjek Penelitian

Informasi atau subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, baik orang/masyarakat maupun lembaga (perusahaan) yang ada dalam dirinya atau yang terkandung dalam objek penelitian. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah dan masyarakat Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### ***E. Instrumen Penelitian***

#### 1. Instrument Utama

Intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrument utama, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data berdasarkan keadaan sesungguhnya. Peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitiannya.

#### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan untuk menggunakan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang berupa pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan.

#### 3. Buku dan Alat Tulis

Buku dan alat tulis ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang di dapat dari sumber wawancara atau informan.

#### 4. Handphone (HP)

Untuk mendokumentasikan proses penelitian dan berbagai kegiatan yang dianggap penting yaitu dengan menggunakan handphone. Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat kurang akurat, maka hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

#### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>35</sup> Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.<sup>36</sup> Berikut teknik pengumpulan data:

##### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>37</sup> Dalam menggunakan metode observasi (pengamatan) cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format-

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke 14* (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 402

<sup>36</sup> Sujarweni V Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31

<sup>37</sup> Abdarrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cetakan ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),104

format atau blangko pengamatan sebagai instrument.<sup>38</sup> Peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ketempat penelitian, dan meminta data dari aparaturnya/Pekon/Desa yang bersangkutan untuk dilakukan pencatatan hal yang terkait dengan penelitian.

## 2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.<sup>39</sup>

Metode *indepth interview* ini digunakan untuk mewawancarai Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Perencanaan dan Umum, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat Desa Buntu Karya. Metode ini digunakan untuk menggali data tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan infrastruktur desa.

Teknik pengumpulan data *In-Depth Interview* merupakan suatu metode wawancara mendalam untuk mengeksplorasi point tambahan dan jika memungkinkan atau diperlukan untuk merubah arah. *In-Depth*

---

<sup>38</sup> Suhaini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 272

<sup>39</sup>Devania, Annesa, "Wawancara Mendalam (*indepth interview*)" dalam [Http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm](http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm), diakses tanggal 28 Februari 2022

*Interview* dilakukan dengan jumlah responden yang kecil untuk mengeksplorasi gagasan, ide, program ataupun situasi sehingga diharapkan *In-Depth Interview* memberikan hasil yang detail mengenai topik yang menjadi penelitian karena kita bisa mendeskripsikan data kita dengan tingkah laku, sikap dan persepsi seseorang.

Langkah-langkah yang harus dilalui dalam melakukan *In-Depth Interview*, yaitu:

- 1) *Perencanaan*, yaitu melakukan identifikasi dan membuat list siapa yang akan dilibatkan dalam wawancara serta mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan dari setiap stakeholder yang dilibatkan.
- 2) *Mengembangkan instrument*, yaitu membuat draft interview sebagai panduan melakukan wawancara dan juga membuat bagaimana cara melakukan interview supaya terdapat kekonsistenan dalam melakukan wawancara.
- 3) *Melatih para pewawancara*. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah pewawancara didalam melakukan tugasnya.
- 4) *Melakukan pengumpulan data*. Adapun langkah yang harus kita dilakukan adalah mengatur jadwal pertemuan dengan responden dan tentukan beberapa durasi waktu yang dibutuhkan.
- 5) *Melakukan analisa data*. Data sudah terkumpul kita analisa, kelompokkan jawaban responden yang mirip atau serupa, cek apakah responden yang muda mempunyai pandangan yang berbeda dengan yang

lebih tua, apakah responden pria dan wanita mempunyai perbedaan sikap, bagaimana dengan antusiasme responden dalam menjawab pertanyaan

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>40</sup> Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.<sup>41</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi tetap mengingat apa saja data yang diperlukan juga sesuai dengan pertanyaan yang dibuat sebelumnya. Peneliti tidak terikat dengan batasan-batasan namun tetap sopan sehingga proses wawancara bisa berjalan dengan luwes dan tidak kaku. Adapun yang akan diwawancarai atau dimintai data atau sumber adalah aparatur Desa, kepala Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam struktur Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data baik berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pembangunan program pelaksanaan

---

<sup>40</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),83

<sup>41</sup> Matri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES, 1995).192

infrastruktur Desa di Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

Suharmisi Arikunto berpendapat dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” bahwa:

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, metode cepat, legenda, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data dapat menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dan teknik data triangulasi. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, teknik validitas data dengan uji kredibilitas yang akan dipakai yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik.<sup>44</sup>

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber yakni menggali kebenaran atau kredibilitas suatu data dengan memeriksa data yang didapat melalui berbagai sumber.

<sup>42</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. hal. 231

<sup>43</sup>Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 218-219

<sup>44</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT remaja Rosda Karya, 2018), 330.



Triangulasi sumber difungsikan oleh peneliti untuk memeriksa data yang didapat dari hasil dokumentasi, observasi serta wawancara dengan pemerintah desa Buntu Karya.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yakni triangulasi yang diadakan dengan memeriksa data dari sumber yang serupa tapi berbeda teknik, triangulasi teknik difungsikan oleh peneliti setelah memperoleh hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi.

### ***H. Teknik Analisis Data***

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disusun kedalam pola, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis secara seksama dan sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Adapun teknik dalam menganalisis data, sebagai berikut:

#### 1. Mengumpulkan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data dikelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan.

Setelah data dikelompokkan, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih dimengerti.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhana, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting mencari tema pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut:

- 1) Memilih data yang dianggap penting
- 2) Membuat kategori data
- 3) Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data diarahkan agar terorganisasikan dan terusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar semakin muda untuk dipahami.

### a. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian datanya dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

### b. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Desa Buntu Karya

##### a. Sejarah Desa Buntu Karya

Asal mula terbentuknya Desa Buntu Karya adalah hasil dari pemekaran Desa Padang Sappa Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) pada tahun 1985 dengan status Desa Persiapan dan pemberian Nama Desa pemekaran mengalami perdebatan yang cukup panjang antara masyarakat dua wilayah (Dusun) yaitu Kariako dan Buntu Batu dimana kedua wilayah ini memiliki sejarah yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dan sangat dikenal oleh masyarakat sekitarnya.<sup>45</sup>

Di tengah-tengah sengitnya perdebatan salah seorang dari mereka tampil kedepan dan berkata bahwa kedua wilayah ini mempunyai satu symbol atau lambing yaitu **Buntu Tallu Lossonna** sebuah gunung yang berdiri kokoh dan megah diantara dusun Rewang dan dusun Sompu, setelah mendengar kata symbol atau lambing, maka muncullah ide bahwa nama desa adalah Buntu Karya yang terdiri dari dua suku kata yaitu **BUNTU** adalah bagian dari kata **Buntu Tallu Lossonna** berarti **Gunung** dan **Karya** adalah bagian dari kata **Kariako** yang diartikan sebagai sebuah **Hasil** dan "**KARYA**

---

<sup>45</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, "*Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana pembangunan jangka menengah)*", desa Buntu Karya, 2016-2021, h.8

**NYATA**”, itulah cerita asal mula terbentuknya Desa Buntu Karya sampai sekarang.

Pusat Pemerintahan Desa Buntu Karya terletak di Dusun Kariako dan untuk menuju kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan atau jalan kaki karena tidak jauh dari jalan poros Palopo Makassar, berhubungan langsung dengan ibukota kecamatan Ponrang Selatan dan ibukota kabupaten Luwu di Belopa. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1988 status desa persiapan berubah menjadi desa defenitif dan Buntu Batu memisahkan diri dari Desa Buntu Karya selanjutnya Pusat Pemerintahan Desa Buntu Karya terletak di Dusun Kariako. Kemudian pada tahun 2008 Kecamatan Ponrang memekarkan Kecamatan Ponrang Selatan dan Desa Buntu Karya bergabung ke Kecamatan Ponrang Selatan sampai sekarang.<sup>46</sup> Dari awal terbentuknya sampai sekarang Desa Buntu Karya sudah beberapa kali mengalami pergantian pemimpin atau Kepala Desa, tergambar dalam tabel berikut.<sup>47</sup>

**Tabel 4.1 Periode Kepala Desa Buntu Karya 1985-2021**

Tahun	Peristiwa
1985-1988	Andi Mappe menjadi penjabat Kepala Desa
1988-2001	Andi Mappe kepala depentif (3 Periode)
2001-2002	M. Sabri menjadi penjabat Kepala Desa
2002-2003	Ihlas menjadi penjabat Kepala Desa
2003-2015	Ihlas menjadi kepala depentif (2 Periode)

<sup>46</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buntu Karya 2016-2021, hal 9

<sup>47</sup>Data Profil Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

- Akhir 2009
- Persiapan Pemilihan Kepala Desa
  - Rudianto menjabat Kepala Desa
- Akhir tahun 2015
- Persiapan Pemilihan Kepala Desa
  - Rudianto menjabat Kepala Desa
  - Bahrudin Kepala Desa Terpilih periode 2016-2021

Sumber: Data Profil Desa Buntu Karya tahun 2021

#### b. Kondisi Demografis

Desa Buntu Karya merupakan salah satu Desa dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terletak 20 Km dari ibu kota Kabupaten Luwu. Desa Buntu Karya setelah dimekarkan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa luas wilayah Desa Buntu Karya kurang lebih 8.9km<sup>2</sup>.<sup>48</sup> Berdasarkan letak geografisnya, wilayah ini adalah dataran dan sedikit berbukit.

Desa Buntu Karya terletak di dataran rendah dengan ketinggian 5 diatas permukaan laut, luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah wilayah terbesar di wilayah Kecamatan Ponrang Selatan.<sup>49</sup>

Adapun batas-batas wilayah ditampilkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Batas-batas Wilayah desa Buntu Karya**

Wilayah	Perbatasan
Utara	Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan

<sup>48</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, “*Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana pembangunan jangka menengah)*”, desa Buntu Karya,2016-2021, h.10

<sup>49</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, “*Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana pembangunan jangka menengah)*”, desa Buntu Karya,2016-2021, h.10

Selatan                      Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang

Timur                         Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan

Barat                         Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon

Sumber: Data Profil Desa Buntu Karya tahun 2021

Secara administratif wilayah Desa Buntu Karya terdiri atas 4 Dusun dan 7 (tujuh) RT (Rukun Tetangga) yaitu Dusun I Kaccanning terdiri dari 1 (satu) RT, Dusun II Sompu terdiri dari 1 (satu) RT, Dusun III Rewang terdiri dari 2 (dua) RT dan Dusun IV Kariako terdiri dari 3 (tiga) RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Buntu Karya sebagian besar lahannya untuk pertanian yang berupa perswahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan pekuburan.

Berdasarkan data komposisi penduduk, jumlah penduduk Desa Buntu Karya sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Buntu Karya 2021**

No	Nama Dusun	JumlahKK	Jiwa		
			LK	PR	Juml.
1	Dusun Kariako	295	534	511	1.045
2	Dusun Kaccanning	80	122	122	234
3	Dusun Sompu	86	161	151	312
4	Dusun Rewang	177	354	351	705
Jumlah		638	1.171	1.125	2.296

Sumber: Data Profil Desa Buntu Karya tahun 2021

c. Visi dan Misi Desa Buntu Karya

Berbicara visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Maka visi Desa Buntu Karya yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Desa Buntu Karya Yang Terampil, Mandiri, Sejahtera, Dan Religius”**. Agar visi sebagaimana tersebut bisa tercapai maka diterapkan misi sebagai berikut:

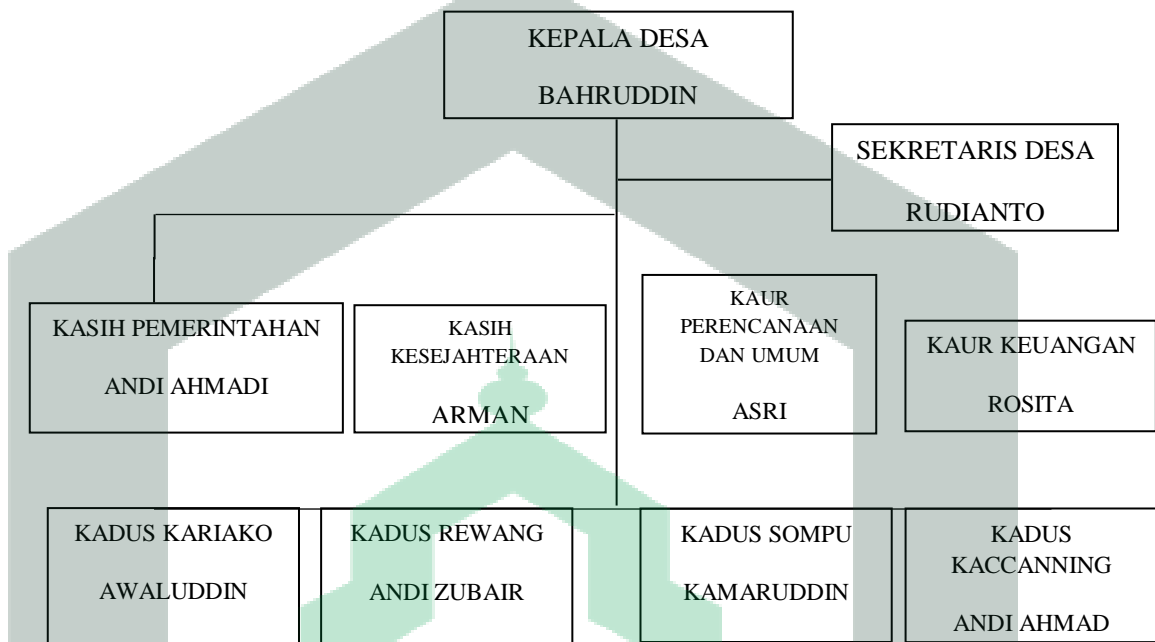
- 1) Mendorong serta mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena disektor ini merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Buntu Karya.
- 2) Membangun kerja sama yang baik dengan keamanan.
- 3) Menjalin kerja sama dengan Pemerintah serta pihak ketiga untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada di Desa.
- 4) Mengenali sumber-sumber pendapatan potensial Desa yang ditujukan untuk menambah pendapatan asli desa demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 5) Mendorong industri rumah tangga dan industri Desa Mikro pada saat pasca panen hasil pertanian.
- 6) Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan yayasan pendidikan untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan berbasis keagamaan.
- 7) Membangun serta mendorong kemitraan dengan pihak ketiga dalam upaya peningkatan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan.
- 8) Menumbuh kembangkan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam membangun Desa.



9) Mendorong keikutsertakan masyarakat dalam berbagi program dan kegiatan Desa.<sup>50</sup>

d. Struktur Organisasi

**Tabel 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Karya 2021**



e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu unsur mutlak dalam suatu wilayah, dalam upaya pembangunan kegiatan ekonomi dan kelancaran pembangunan disuatu daerah sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang ada.

**Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Buntu Karya**

Jenis Sarana dan Prasarana	Dusun Kaccanning	Dusun Sompu	Dusun Rewang	Dusun Kariako
Kantor Desa				1

<sup>50</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, "Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana pembangunan jangka menengah)", desa Buntu Karya, 2016-2021, h.13

Poskesdes		1		
Masjid	2	2	1	2
TK			1	1
SD/MI			2	1
SMP/MTS			1	
SMA/MA			1	
Lapangan				1

Sumber: Data Profil Desa Buntu Karya tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa saran dan prasaran yang ada di Desa Buntu Karya yaitu kantor desa berjumlah 1 unit, poskesdes berjumlah 1 unit, masjid berjumlah 7 unit, taman kanak-kanak berjumlah 2 unit, SD/MI berjumlah 3 unit, SMP/MTS berjumlah 1 unit, SMA/MA berjumlah 1 unit, dan lapangan berjumlah 1 unit.

## 2. Perencanaan pembangunan

Berdasarkan hasil yang telah diteliti, setiap Desa diharuskan memiliki perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transportasi serta demokratisasi yang berkembang di setiap Desa, maka Desa dipastikan harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu khususnya Desa Buntu Karya.

RPJMDes merupakan rancangan pembangunan Desa yang memiliki jangka waktu lima tahun. RPJMDes merupakan dokumen penting setiap perencanaan pembangunan Desa yang mendukung perencanaan tingkat kabupaten.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### 1. Hasil Wawancara

#### a. Identitas Informan Pertama

Nama Informan : Bahruddin  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 51 Tahun  
 Status Pekerjaan : Kepala Desa  
 Alamat : Dusun Kariako Desa Buntu Karya  
 Tanggal Wawancara : 10 Maret  
 Tempat Wawancara : Dusun Kariako

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1.	Apakah benar bapak sendiri yang merencanakan program pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Buntu Karya?	Usulan dari masyarakat yang diwakilkan oleh kepala Dusun yang disepakati dalam musyawarah Desa bersama dengan saya sendiri, Aparat Desa, BPD dan masyarakat.
2.	Bagaimana tanggapan bapak tentang pembangunan infrastruktur ini?	Sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas.
3.	Pada tahun 2020 dan 2021, apakah ada pembangunan infrastruktur di Desa Buntu Karya?	Ya ada. Diantaranya Pembentukan jalan Tani di Dusun Rewang dan Penimbunan/pengerasan jalan tani di Dusun Rewang, pembangunan 2 unit plat dekker di Dusun Kariako dan Dusun Rewang, dan pembangunan saluran irigasi tersier.
4.	Ada 4 Dusun di Desa Buntu Karya, mengapa hanya Dusun Rewang yang diberikan fasilitas jalan tani dan Dusun Kariako pembangunan plat	Karena disetiap rapat Desa, Dusun diberikan kesempatan untuk melihat program apa yang ingin dibangun di dusunnya masing-masing sehingga tiap Dusun memberikan usulan programnya.

Dekker serta siapa yang mengatur anggaran program tersebut?

Seperti contohnya Dusun Rewang yang memprioritaskan jalan tani dahulu sedangkan Dusun lain memilih pembangunan infrastruktur yang berbeda. Kemudian dari tahun 2019 hingga sekarang dunia terkena wabah Covid sehingga berpengaruh kepada pengasilan masyarakat, anggaran dana Desa atau APBD sebagian tersalurkan ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sehingga pembangunan infrastruktur desa terbatas. Yang mengatur anggaran program tersebut yaitu saya sendiri dan sekretaris Desa berkoordinasi dengan Pelaksana kegiatan dan kemudian disetujui oleh BPD.

5. Apakah yang mendorong bapak sehingga berinisiatif untuk mengadakan pembangunan tersebut?

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah dimana setiap kepala dusun mengajukan skala prioritas pembangunan di setiap dusun masing-masing, seperti yang saya katakan di jawaban pertanyaan sebelumnya kemudian merupakan tanggung jawab saya sebagai Kepala Desa Buntu Karya.

6. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam waktu pengerjaanya dan berapa lamakah kurun waktu pembangunan infrastruktur itu dibuat?

Iya sudah tepat waktu karena program tersebut dilaksanakan pada saat musim tanam padi belum dimulai untuk pembangunan jalan tani dan rampung pada musim tanam tiba dan musim kemarau untuk saluran irigasi tersier dan pembangunan plat dekker.

Waktu yang digunakan kurang lebih 3 bulan untuk setiap pembangunan infrastruktur, mulaidari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

7. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini? Seluruh masyarakat Desa Buntu Karya, saya pribadi, Aparat Desa dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dari BPD.
8. Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan infrastruktur Desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan? Ya. Dilibatkan.
9. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut? Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat untuk ikut serta pada Musyawarah Dusun/Desa.
10. Apakah bapak turun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut? Ya. Bersama dengan Aparat Desa, pengawas TPK dan masyarakat.
11. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Kendala yang dialami dalam pelaksanaan ini yaitu akses jalan yang kurang baik ke lokasi pertanian, serta cuaca yang tidak stabil.
12. Bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program ini? Masyarakat ikut terjun langsung dalam membantu proses pengerjaan infrastruktur tersebut.
13. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut? Masyarakat Desa Buntu Karya.
14. Apakah dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dapat membantu hidupan sehari-hari masyarakat? Iya. Sangat membantu karena mempermudah akses masyarakat dalam pekerjaannya.
15. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang daya saing daerah? Ya. terutama dengan adanya jalan tani tersebut merupakan salah satu penunjang, mempermudah petani dalam memasarkan atau mendistribusikan hasil panen. Kemudian saluran irigasi tersier sangat

dibutuhkan oleh petani karna hasil panen dipengaruhi oleh keadaan air tanah maupun air permukaan untuk menunjang pertanian. Dan untuk plat Duiker sangat penting untuk mengaliri air hujan ke sungai melalui drainase agar air tidak merusak jalan. Sekiranya pendapat saya jika pembangunan infrastrukturnya baik maka akan menunjang daya saing daerah.

16. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari program ini?

Dampak positif dari pembangunan jalan Tani ini masyarakat bisa merasakan langsung akses kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya itu bisa mempermudah atau semakin lancar dan mengalami peningkatan. Saya rasa tidak ada dampak negatif dari pembangunan jalan tersebut.

#### b. Identitas Informan Kedua

Nama Informan : Rudianto  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 47 Tahun  
 Status Pekerjaan : Sekretaris Desa  
 Alamat : Dusun Kariako  
 Tanggal Wawancara : 10 Maret  
 Tempat Wawancara : Dusun Kariako

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1.	Siapakah yang merencanakan program pembangunan infrastruktur di Desa ini?	Usulan dari masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Dusun masing-masing yang disepakati dalam Musrembang Desa.
2.	Pada tahun 2020 dan 2021, apakah ada pembangunan infrastruktur di Desa Buntu	Iya, ada yaitu pembangunan jalan tani di Dusun Rewang, pembangunan saluran irigasi tersier di Dusun Rewang dan

- Karya?
- Kariako dan pembangunan plat duiker Dusun Kariako.
3. Ada 4 Dusun di Desa Buntu Karya, mengapa hanya Dusun Rewang yang diberikan fasilitas jalan tani dan dusun Kariako untuk pembangunan saluran irigasi tersier, serta siapa yang mengatur anggaran program tersebut?
 

Karena tiap Kepala Dusun memberikan masukan skala prioritas pembangunan di Dusunnya masing-masing. Dan pembangunan jalan tani ini diprioritaskan oleh Dusun Rewang, sedangkan Dusun lain memilih infrastruktur yang berbeda seperti dusun Kariako yang mengusulkan pembangunan saluran irigasi tersier. Anggaran program infrastruktur ini diatur oleh Pelaksana Kegiatan bersama dengan saya selaku Sekertaris Desa dan Kepala Desa yang disetujui oleh BPD.
  4. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya dan berapa lamakah kurun waktu untuk pembangunan itu dibuat?
 

Ya sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Waktu yang digunakan kurang lebih 3 bulan untuk tiap pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.
  5. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini?
 

Kepala Desa, Aparat Desa, BPD serta masyarakat Desa Buntu Karya.
  6. Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan infrastruktur Desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan?
 

Ya dilibatkan pada rapat dusun kemudian diwakilkan oleh Kepala Dusun di rapat Desa, karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur Desa.
  7. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut?
 

Dengan mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah tingkat Dusun.
  8. Apakah bapak turun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut?
 

Ya, bersama Kepala Desa, Pengawas TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan masyarakat.

9. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Akses jalan yang kurang memadai.
10. Bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program ini? Sangat antusias. Masyarakat turut ikut serta membantu proses pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut.
11. Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut? Ya, dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur untuk dapat memberikan arahan apabila ada yang kurang dari tahapan pengerjaannya
12. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur ini? Semua masyarakat Desa Buntu Karya terkhususnya para petani.
13. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang daya saing daerah? Ya. Dari pembangunan saluran irigasi untuk penunjang hasil panen hingga pembangunan jalan Tani ini membantu petani dalam memasarkan hasil panen.
14. Apakah dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat? Sangat membantu karena para petani sudah lebih mudah mengangkut kebutuhan pertanian seperti pupuk dari fasilitas, kemudian dari fasilitas saluran irigasi tersier masyarakat tidak lagi susah mendapatkan sumber air untuk pertanian.
15. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari program ini? Dampak positif dari pembangunan infrastruktur tersebut ialah sangat membantu masyarakat khususnya para petani dalam pekerjaannya.

c. Identitas Informan Ketiga

- Nama Informan : Asri
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 56 Tahun
- Status Pekerjaan : Kaur Perencanaan dan Umum



Alamat : Dusun Kariako

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2022

Tempat Wawancara : Kantor Desa Buntu Karya

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1.	Siapakah yang merencanakan program pembangunan infrastruktur di Desa ini?	Masyarakat yang diwakilkan oleh kepala Dusun dan pemerintah Desa serta BPD dalam Musrembang Desa.
2.	Pada tahun 2020 dan 2021, apakah ada pembangunan infrastruktur di Desa Buntu Karya?	Iya ada, di Dusun Rewang dari pembentukan jalan tahun anggaran 2020 dan penimbunan/pengerasan tahun anggaran 2021, pembangunan irigasi tersier di Dusun Rewang dan Kariako serta pembangunan plat duiker di Dusun Kariako.
3.	Ada 4 Dusun di Desa Buntu Karya, mengapa hanya Dusun Rewang yang diberikan fasilitas jalan tani dan siapa yang mengatur anggaran program tersebut?	Karena hanya dusun Rewang yang saat ini membutuhkan dan memberikan skala prioritasnya untuk membangun jalan tani. Sedangkan Dusun lain berbeda prioritas pembangunannya. Yang mengatur anggarannya ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pelaksana Kegiatan yang disetujui oleh BPD.
4.	Jika jalan tani dapat dianggarkan, mengapa jalan desa tidak dianggarkan sementara jalan desa yang ada di desa Buntu Karya kurang baik atau perlu perbaikan?	Pertanyaan yang cukup menarik ananda, jalan desa dapat dianggarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan, tapi pemerintah desa lebih fokus ke jalan tani, plat dekker, dan pembangunan saluran irigasi tersier karena pembangunan jalan tani dan saluran irigasi tersier sangat dibutuhkan masyarakat. Sedangkan jalan desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan pemeliharaan karena APBD lebih memprioritaskan pemeliharaan, dimana diketahui APBD untuk

menganggarkan rabat beton atau pengaspalan memakan anggaran belanja yang cukup banyak sementara APBD sebagian besar dialokasikan ke Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa seperti BLT sehingga pembangunan infrastruktur dua tahun ini terbatas dan tidak merata, namun program yang dianggarkan semuanya telah terealisasi dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

5. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya dan berapa lamakah kurun waktu pembangunan itu dibuat?
 

Menurut saya sudah tepat waktu dan tepat sasaran karena dilakukan sebelum musim tanam. lama waktu yang digunakan kurang lebih 3 bulan untuk setiap pembangunan infrastruktur dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunannya.
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini?
 

Menurut saya dengan adanya pembangunan infrastruktur ini dapat membuat Desa semakin meningkat dalam hasil pertanian dan merasa nyaman dengan apa yang disediakan pemerintah.
7. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan tani ini?
 

Tentu masyarakat, aparat Desa, dan BPD.
8. Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan infrastruktur Desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan?
 

Iya masyarakat dilibatkan.
9. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut?
 

Pemerintah Desa mengundang masyarakat agar ikut serta dalam musyawarah Desa.

10. Apakah bapak turun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut? Ya turun langsung.
11. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Kendalanya dapat dilihat dari akses jalan yang kurang baik.
12. Bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program ini? Masyarakat sangat antusias sehingga terjun langsung dalam pengerjaan infrastruktur ini.
13. Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur ini? Ya, Dilibatkan.
14. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur ini? Masyarakat Desa Buntu Karya khususnya para petani.
15. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang daya saing daerah? Ya dapat menunjang daya saing daerah. Jika pembangunan infrastrukturnya baik maka hasil dari pengelolaan sumber dayanya pun juga baik.
16. Apakah dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat? Iya, sangat membantu dalam pekerjaan masyarakat khususnya para petani.
17. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari program ini? Mempermudah masyarakat serta para petani mendistribusikan hasil dari pertaniannya. Dampak negatif tidak ada.

d. Identitas Informan Keempat

- Nama Informan : A. Zubair
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 43 Tahun
- Status Pekerjaan : Kepala Dusun

Alamat : Dusun Rewang

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2022

Tempat Wawancara : Dusun Rewang

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1.	Siapakah yang merencanakan program pembangunan infrastruktur di Desa ini?	Usulan masyarakat pada rapat dusun kemudian disampaikan oleh kepala Dusun pada musyawarah Desa yang disepakati oleh aparat desa dengan BPD.
2.	Mengapa bapak mengusulkan pembuatan dan penimbunan jalan tani di dusun anda?	Berdasarkan hasil rapat tingkat dusun, dimana hasil rapat tersebut didasarkan dari kondisi di lapangan yang mendesak.
3.	Pada tahun 2020 dan 2021, apakah ada pembangunan infrastruktur jalan tani dan plat duiker di Desa Buntu Karya?	Ada, di Dusun yang saya pimpin yaitu Dusun rewang.
4.	Ada 4 Dusun di Desa Buntu Karya, mengapa hanya Dusun Rewang yang diberikan fasilitas jalan tani?	Karena prioritas Dusun Rewang lebih kepada jalan tani dan plat duiker adalah bonus karena masih bisa dianggarkan, sedangkan Dusun lain memilih pembangunan infrastruktur berbeda sesuai dengan keadaan kebutuhan lapangan.
5.	Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya dan berapa lamakah kurun waktu pembangunan infrastruktur itu dibuat?	Ya menurut saya sudah tepat waktu dan tepat sasaran karena tahapan pengerjaannya pada saat musim tanam belum dimulai dan waktu yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur ini kurang lebih 3 bulan untuk setiap infrastruktur.
6.	Bagaimana tanggapan bapak mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini?	Saya selaku Kepala Dusun sangat antusias karena dapat membantu masyarakat dalam pekerjaannya yang didominasi oleh petani.
7.	Siapa saja yang terlibat dalam	Masyarakat khususnya dusun Rewang,

- pelaksanaan program BPD dan Aparat Desa Buntu Karya. infrastruktur ini?
8. Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan infrastruktur Desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan? Iya betul. Karena peran penting masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.
  9. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut? Dengan mengajak atau mengundang masyarakat ikut serta dalam rapat Desa.
  10. Apakah bapak turun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut? Ya bersama dengan aparat Desa dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan).
  11. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Kendalanya ada pada akses jalan yang kurang memadai.
  12. Bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program ini? Bentuk dukungan dapat dilihat pada saat pengerjaan jalan tani ini, masyarakat terjun langsung ikut dalam proses pengerjaannya.
  13. Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut? Ya dilibatkan.
  14. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur ini? Masyarakat Desa Buntu Karya.
  15. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang daya saing daerah? Ya, karena dengan jalan tani yang baik, petani mendapatkan akses yang mudah menuju lahan pertanian, dimana itu mempermudah pendistribusian hasil panen petani guna menunjang daya saing desa.
  16. Apakah dengan Ya, sangat membantu karena akses jalan

dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat? sudah memadai dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam pekerjaannya.

17. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari program ini? Dampak positifnya dapat dilihat dari pekerjaan para petani yang terbantu lebih efisien. Saya kira dampak negatifnya tidak ada.

e. Identitas Informan Kelima

Nama Informan : Harbi  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 48 Tahun  
 Status Pekerjaan : Petani  
 Alamat : Dusun Rewang  
 Tanggal Wawancara : 11 Maret 2022  
 Tempat Wawancara : Dusun Rewang

- | No | Pertanyaan Peneliti  | Jawaban Informan  |
|----|--|---|
| 1. | Siapakah yang merencanakan program pembangunan infrastruktur di Desa ini?                            | Yang merencanakan program pembangunan desa ini yaitu Dari rapat kepala Dusun diwakilkan pada saat dalam Musrembang yang dihadiri aparat Desa dan BPD.         |
| 2. | Apakah bapak sendiri hadir dalam musyawarah tersebut?  | Ya hadir.   |
| 3. | Jadi apakah bapak tau dengan program insfratraktur yang di laksanakan di desa?                       | Ya, saya tahu berdasarkan kabar dari kepala Dusun Rewang  |
| 4. | Baiklah, menurut anda apakah program insfrastruktur yang dilaksanakan sudah sesuai kebutuhan petani? | Ya sangat sesuai, karna sangat membantu petani dalam aktifitas pertanian, seperti mudah mendapatkan air untuk pertanian dan pada saat mengangkut hasil panen. |

5. Berapa lamakah kurun waktu pembangunan infrastruktur jalan Tani itu dibuat? Kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan setiap infrastruktur.
6. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya? Ya sudah tepat waktu karena dilakukan sebelum kami masuk musim tanam dan pada saat musim kemarau.
7. Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan infrastruktur Desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan? Ya, sangat berperan karna setiap ide yang di tawarkan oleh kepala dusun itu sudah di bicarakan sebelumnya bersama masyarakat dusun.
8. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Kami para masyarakat, aparat Desa dan BPD bersama Timnya.
9. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut? Pemerintah melalui kepala Dusun, melakukan musyawarah tingkat dusun untuk membahas apa apa saja yang mendesak di dusun untuk di usulkan dalam musyawah tingkat desa
10. Apakah bapak terjun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut? Ya, karna saya ikut serta dalam program tersebut, dengan membersihkan jalan tani yang di buat, pembersihan saluran irigasi serta pembuatan palt duiker.
11. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Kendalanya dapat dilihat dari infrastruktur yang kurang baik, dimana membuat mobil pengangkut material terhambat.
12. Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut? Ya dilibatkan. Kami diberikan tanggung jawab ikut serta dalam mengontrol pembangunan jalan tani ini.
13. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur ini? Tiada lain adalah masyarakat Desa Buntu Karya khususnya kami para petani. Seperti kita lihat pada pembangunan

saluran irigasi tersier masyarakat bisa langsung merasakan efeknya yaitu air tersedia di lahan, meningkatkan produksi, terjalinnya hubungan baik antar kelompok tani baik dalam kelompok tani maupun dalam kawasan desa/kelurahan.

14. Menurut bapak, apakah pemerintah Desa sangat memperhatikan masyarakatnya? Saya rasa sangat memperhatikan. Contohnya, pembangunan Jalan Tani ini sangat membantu kami para petani untuk melakukan pekerjaan
15. Apakah dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya, sangat membantu seperti yang saya jawab dipertanyaan sebelumnya.
16. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari program ini? Dampak positifnya ya akses jalan lebih memadai, sedangkan dampak negatif sampai detik ini belum memiliki dampak negatif.

f. Identitas Informan Keenam

Nama Informan : Abdul Hamid

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 58 Tahun

Status Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Rewang

Tanggal Wawancara : 25 Maret

Tempat Wawancara : Dusun Rewang

- | No | Pertanyaan Peneliti   | Jawaban Informan  |
|----|---|---|
| 1. | Siapakah yang merencanakan program pembangunan infrastruktur di Desa ini? | Dari rapat dusun diwakilkan pada saat Musrembang oleh kepala dusun yang |



dihadiri aparat Desa dan BPD.

2. Apakah bapak sendiri hadir dalam musyawarah tersebut? Tidak.
3. Jadi apakah bapak tau dengan program insfratraktur yang di laksanakan di desa? Ya, saya tahu berdasarkan kabar dari kepala Dusun Rewang
4. Baiklah, menurut anda apakah program insfrastruktur yang dilaksanakan sudah sesuai kebutuhan masyarakat? Ya sangat sesuai, karna sangat membantu dalam pekerjaan pertanian kami sebagai petani.
5. Berapa lamakah kurun waktu pembangunan infrastruktur jalan Tani itu dibuat? Kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan untuk masing-masing infrastruktur yang dibangun.
6. Menurut bapak, apakah pembangunan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya? Ya sudah tepat waktu karena dilakukan sebelum kami masuk musim tanam.
7. Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan infrastruktur Desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan? Ya, kami ikut terlibat dalam perencanaan ini. Desa memeberikan kami peluang untuk menyumbang ide-ide/gagasan.
8. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini? Kami para masyarakat, aparat Desa dan BPD bersama Timnya.
9. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut? Pemerintah melalui kepala Dusun, melakukan musyawarah tingkat dusun untuk membahas apa apa saja yang mendesak di dusun untuk di usulkan dalam musyawah tingkat desa
10. Apakah bapak terjun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut? Ya, karna saya ikut serta dalam program tersebut, dengan membersihkan jalan tani yang di buat, pengerjaan saluran irigasi dan pembuatan plat duiker.
11. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kendalanya dapat dilihat dari jalan yang kurang baik, dimana membuat mobil

- infrastruktur ini? pengangkut material terhambat.
12. Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut? Ya dilibatkan. Kami diberikan tanggung jawab ikut serta dalam mengontrol proses pembangunan infrastruktur.
13. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur ini? Kami sebagai masyarakat desa Buntu Karya. Pembangunan ini sangat berpengaruh dan bermanfaat bukan hanya bagi kami yang bekerja sebagai petani, tapi juga mempermudah akses kendaraan. Kami juga bisa merasakan langsung efek dari pembangunan saluran irigasi tersier yaitu air tersedia di lahan, meningkatkan produksi, terjalinnya hubungan baik antar kelompok tani baik dalam kelompok tani maupun dalam kawasan desa/kelurahan.
14. Menurut bapak, apakah pemerintah Desa memperhatikan masyarakatnya? Sangat memperhatikan. bisa dilihat dari pembangunan Jalan Tani ini sangat membantu kami para petani, memudahkan kami lebih mudah dalam pekerjaan.
15. Apakah dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya, sangat membantu seperti yang saya jawab dipertanyaan sebelumnya.
16. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari program ini? Dampak positifnya kami lebih mudah mendapatkan aliran air dalam pertanian dan akses jalan lebih memadai, sedangkan dampak negatif sampai detik ini belum ada.

## 2. Pembahasan

### a. Program Terealisasi

Dalam menjalani sosial ekonomi masyarakat desa Buntu Karya, desa ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan, dan tentunya pada jalan akses yang memadai yang mengangkut hasil mata pencaharian mereka.

Berikut ini adalah program pembangunan infrastruktur Desa Buntu Karya yang terealisasi dari tahun 2020-2021 yang dananya bersumber dari Dana Desa.

**Tabel 4.6 Program pembangunan infrastruktur Desa Buntu Karya T.A 2020-2021**

Pembangunan	Anggaran	Tahun	Lokasi
Pembangunan/Pembentukan Jalan Tani	13.583.000	2020	Dusun Rewang
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	180.409.000	2020	Dusun Kariako
Pembangunan Plat Dekker 2 Unit	40.358.000	2020	Dusun Kariako dan Dusun Rewang
Pengerasan/Penimbunan Jalan Tani	19.988.000	2021	Dusun Rewang
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Galian)	23.623.000	2021	Dusun Kariako

Sumber: Data APB Desa Buntu Karya tahun anggaran 2020-2021

Dana yang digunakan oleh pemerintah Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dalam pembangunan infrastruktur bersumber dari dana Desa. Dana Desa yang diterima merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebagaimana yang dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan yang ada di Desa Buntu Karya berdasarkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur di desa yang berkaitan dengan sarana pendukung perekonomian masyarakat. Sehingga program pembangunan infrastruktur yang direncanakan di desa tahun 2020 dan 2021 yaitu

pembangunan/pembentukan jalan tani, pembangunan saluran irigasi tersier dan pembangunan plat dekker.

Pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Adapun ruang lingkup pembahasan pembangunan infrastruktur yang terealisasi dari data yang ada serta dari hasil wawancara, sebagai berikut:

#### 1) Pembangunan Jalan Tani

Salah satu upaya untuk mengembangkan sektor pertanian adalah dengan meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, diantaranya melalui pembangunan jalan usaha tani. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan dan umum, kepala dusun, serta tokoh masyarakat sekaligus petani dapat dideskripsikan bahwa program jalan tani merupakan program yang terpilih dalam musyawarah desa.

Dimana dua tahun anggaran dana desa 2020 dan 2021 menganggarkan jalan tani di dusun Rewang. Dari hasil wawancara bapak Bahruddin selaku kepala desa, bapak Ridianto selaku sekretaris desa, bapak Asri selaku kaur perencanaan dan umum, bapak A. Zubair selaku kepala dusun Rewang serta bapak Harbi dan bapak Abdul Hamid selaku masyarakat/petani menyatakan bahwa setiap dusun diberikan kesempatan untuk melihat program

apa yang ingin dibangun di dusunnya masing-masing. Setelah diadakan musyawarah desa, yang dihasilkan hanya dusun Rewang yang mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan tani untuk direalisasikan di dusunnya. Sementara dusun lainnya mengusulkan infrastruktur yang berbeda. Jalan tani terpilih untuk dianggarkan karena dilihat di lapangan dan kenyataan yang ada infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan segera untuk direalisasikan.

Pada latar belakang permasalahan jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat dalam berkegiatan. Setelah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan tani ini, masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari pembangunan jalan tani ini, jalan transportasi semakin mudah untuk menjangkau lokasi pertanian, petani lebih mudah mengangkut kebutuhan pertanian seperti pupuk yang sudah tidak dipikul lagi, serta mempermudah dalam pendistribusian hasil pertanian. Dengan adanya pembangunan jalan usaha tani ini diharapkan dapat mendorong kelancaran distribusi dalam pertanian.

## 2) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier

Agar tanaman dapat hidup dengan subur, selain dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kandungan unsur hara di dalam tanah, juga memperoleh cukup air. Salah satu upaya penyediaan air bagi lahan pertanian adalah dengan membangun irigasi, yaitu usaha

pengadaan dan pengaturan air permukaan untuk menunjang pertanian. Saluran irigasi tersier ini merupakan infrastruktur yang disetujui pembangunannya di dusun Kariako dan sangat dibutuhkan masyarakat Buntu Karya karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan sebagian besar luas wilayah desa Buntu Karya adalah pertanian.

Dari hasil wawancara dengan bapak Harbi dan bapak Abdul Hamid menyatakan bahwa beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya program pembangunan saluran irigasi tersier ialah air tersedia di lahan, meningkatkan produksi, terjalinnya hubungan baik antar kelompok tani baik dalam kelompok tani maupun dalam kawasan desa/kelurahan. Bisa dikatakan saluran irigasi tersier sangat berpengaruh terhadap lahan petani, efeknya biasa dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu adanya penambahan indeks tanam yang tadinya hanya bisa sekali setahun, menjadi dua kali atau lebih. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi di desa melalui peningkatan produksi pertanian. Pembangunan ini dilakukan secara swakelola agar tepat waktu dan tepat sasaran dan mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa Buntu Karya.

### 3) Pembangunan Plat Dekker

Plat dekker sendiri merupakan pembatas jembatan dengan pinggir got, sungai atau dengan irigasi. Pembangunan ini sangat

penting untuk bangunan, karena fungsinya adalah mengaliri air hujan ke aliran sungai melalui drainase. Dengan adanya program ini, masyarakat pedesaan sangat tertolong, membantu perkembangan desa Buntu Karya.

Adapun khusus pembangunan plat dekker dinyatakan letaknya memang sudah tepat pada posisi yang telah direncanakan sehingga manfaat dari bangunan plat dekker ini langsung dirasakan oleh masyarakat dusun Rewang dan dusun Kariako.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa, sekertaris desa, kaur perencanaan dan umum, kepala dusun, serta tokoh masyarakat sekaligus petani dapat dideskripsikan bahwa program yang terpilih dalam pembangunan infrastruktur desa ialah hasil dari musrembang.

Dimana dua tahun terakhir program pembangunan infrastruktur terdapat tiga pembangunan antara lain pembangunan/pembentukan jalan tani, pembangunan saluran irigasi tersier dan pembangunan plat dekker. Program pembangunan infrastruktur di desa ini diusulkan oleh masyarakat ke rapat dusun yang dirampung oleh kepala dusun yang disepakati dalam musyawarah desa bersama dengan kepala desa, aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses

perencanaannya sampai pelaksanaannya masyarakat ikut andil dalam proses kegiatan tersebut.

Pembangunan program infrastruktur desa di Desa Buntu Karya dari 4 Dusun yang ada, pada pembangunan tahun anggaran 2020 sampai 2021 terdapat 2 dusun yang terealisasi pembangunannya yaitu dusun Rewang dan dusun Kariako dan 2 dusun yang tidak dilakukan pembangunan infrastruktur yaitu dusun Sompu dan dusun Kaccanning sesuai kesepakatan musrembang desa. Alasan dari ini karena anggaran dana desa sebagian disalurkan ke bantuan sosial desa seperti BLT. Sesuai pernyataan Kepala Desa Buntu Karya Bapak Bahruddin bahwa “pembangunan infrastruktur hanya mengambil 2 dusun saja karena melihat dari kenyataan yang ada serta didukung oleh PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu dilihat dari tahun 2019 hingga sekarang dunia terkena wabah Covid sehingga berpengaruh kepada penghasilan ekonomi masyarakat, anggaran dana Desa atau APBD sebagian tersalurkan ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak desa seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sehingga pembangunan infrastruktur desa terbatas”.

**Tabel 4.7 APBD Desa Buntu Karya Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

Tahun Anggaran	Bantuan Langsung Tunai (BLT)
----------------	------------------------------



2020	437,830,000,00
2021	519,600,000,00

Yang mengatur anggaran program pembangunan infrastruktur ialah sekretaris desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan dan kemudian disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dari pernyataan bapak Rudianto selaku sekretaris desa dan bapak Asri selaku Kaur Perencanaan dan Umum, pembangunan tiap infrastruktur memakan waktu kurang lebih 3 bulan tepat waktu dan tepat sasaran dimana dusun yang membutuhkan infrastruktur tersebut terealisasi dengan baik. Dusun yang terpilih untuk pembangunan infrastruktur desa Buntu Karya merupakan dusun yang sangat membutuhkan pembangunan mendesak untuk direalisasikan seperti pembangunan jalan tani di dusun Rewang, pembangunan saluran irigasi tersier di dusun Kariako, serta pembangunan plat dekker di dusun Kariako dan dusun Rewang yang disesuaikan dengan anggaran. Pemerintah Desa Buntu Karya telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan.

#### b. Teori Efektivitas Richard M. Steers

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, kita dapat melihat efektivitas pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang daya saing daerah di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu maka perlu dibahas beberapa hal diantaranya:

1) Dilihat dari indikator Pencapaian Tujuan.

Dalam indikator pencapaian tujuan ada dua sub indikator yang perlu dilihat yang terdiri dari tepat waktu dan tepat target atau tepat sasaran. Berdasarkan hasil-hasil temuan yang didapatkan melalui wawancara dengan kepala desa, aparat desa serta masyarakat desa Buntu Karya, bahwa untuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Buntu Karya dilaksanakan dan terlaksana dengan tepat waktu dan juga pelaksanaan program pembangunan tersebut tentunya sudah tepat di Desa Buntu Karya, karena melalui pembangunan tersebut maka masyarakat Desa Buntu Karya sangat terbantu dan juga program tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Buntu Karya.

Adapun beberapa program tersebut diantaranya seperti program pembangunan/pembentukan jalan tani, pembangunan saluran irigasi tersier dan pembangunan plat dekker. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rosita (2021) yang menyatakan bahwa program pembangunan infrastruktur Pedesaan jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah desa. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk

perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.<sup>51</sup>

Pembangunan di Desa Buntu Karya bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, antara lain akses jalanan, transportasi juga meningkat, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrastruktur jalan terlebih dahulu, saluran irigasi tersier serta pembangunan plat dekker sehingga pada tahap pembangunan selanjutnya bisa berjalan lancar tanpa menjadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini dijadikan permasalahan.

## 2) Dilihat dari indikator Integrasi

Dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Buntu Karya terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa/musyawarah dusun, pelaksanaan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta masyarakat juga sangat tertarik akan program tersebut mengingat untuk pembangunan Desa Buntu Karya juga untuk kemajuan Desa Buntu Karya, dari rakyat untuk rakyat.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Giffried R. Rumpia, Burhanuddin Kiay, Helly F. Kolondam (2020) bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Bulude jika

---

<sup>51</sup> Ayu Rosita, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. [https://dgilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full\\_Text.pdf](https://dgilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full_Text.pdf)

diliat dari indikator integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah desa.

### 3) Dilihat dari indikator Adaptasi

Dimulai dari tahap perencanaan program melalui rapat dusun kemudian usulan masyarakat dirangkum dan dibawa ke musyawarah desa berikutnya dibawah ke musyawarah kecamatan sebelum melaksanakan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu rapat pra pelaksanaan kegiatan yang juga melibatkan masyarakat dan tenaga kerja. Adapun anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari Dana Desa dan untuk setiap pembangunan infrastruktur anggarannya berbeda-beda. Pembangunan infrastruktur ini manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil ini didukung oleh penelitian Jesika Watung (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas program pembangunan infrastruktur perdesaan ditinjau dari indikator adaptasi, yaitu menunjukkan ketepatan kebijakan yang sesuai masalah di masyarakatnya. Ketepatan pelaksanaan sudah terkoordinasi baik dari pusat sampai desanya. Ketepatan sasaran program yang tertuju pada penyediaan infrastruktur bagi masyarakat miskin, hampir miskin, kaum perempuan, dan minoritas. Ketepatan proses yang berjalan baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengambilan

keputusan. Ketepatan lingkungan dinilai positif oleh masyarakat terutama dalam pelaksanaan program PPIP.<sup>52</sup>

### c. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih tinggi. Pembangunan Ekonomi Desa Buntu Karya sesuai peraturan Menteri Desa tentang penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa adalah dimana ekonomi masyarakat juga dikembangkan dibidang pembangunan. Pembangunan ditingkat desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK bertugas merekrut masyarakat setempat yang diberdayakan dalam proses pembangunan infrastruktur sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Program pembangua infrastruktur desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk nyatanya adalah tersedianya akses infrastruktur lokal yang lebih memadai serta dapat digunakan secara langsung dan secara cepat oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, Desa Buntu Karya telah melaksanakan pembangunan infrastrukturnya meliputi;

---

<sup>52</sup> Jesika Watung, Wilson Y.Rompas dan Deisi Tampongangoy, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Kayuwi 1 Kecamatan Kawangkoan BaratKabupatenMinahasa*, JAP.No.107,(vol.VII),2021,<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35065/32947>

### 1) Pembangunan Jalan Usaha Tani

Salah satu hal penting yang telah diupayakan oleh pemerintah Desa Buntu Karya adalah Pembangunan infrastruktur pertanian berupa Jalan Usaha Tani. Dapat diketahui sebelum adanya pembangunan Jalan Tani ini, masyarakat sangat kesulitan dalam menjangkau lokasi pertanian, tidak ada jalan umum, bahan seperti pupuk yang dulunya dipikul dan hasil pertanian sulit eksplorasi/impornya, apalagi ketika musim hujan terjadi.

Setelah pembangunan dilaksanakan, Jalan Usaha Tani berpotensi meningkatkan daya saing daerah karena jalan dapat mempermudah daya jangkau distribusi hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani desa Buntu Karya, serta memperlancar mobilitas alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna mulai dari pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen, serta mempermudah petani mengeksplorasi mulai dari kegiatan produksi hingga pendistribusian/pemasaran hasil dari sumber daya alam tani, penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup atau pendapatan masyarakat khususnya petani. Dengan lancarnya kegiatan ekonomi maka pemenuhan kebutuhan masyarakat juga berjalan dengan baik.

### 2) Saluran Irigasi Tersier

Seiring berlakunya pasar bebas atau globalisasi, arus barang termasuk produk pertanian seperti halnya bahan pangan pokok akan semakin

bebas dan mudah memasuki wilayah Indonesia. Menghadapi globalisasi tersebut pembangunan saluran irigasi tersier di desa Buntu Karya membawa dampak positif pada perubahan dalam hasil produksi padi.

Adanya pengadaan dan pengaturan air permukaan buatan ini dapat meningkatkan hasil produksi serta efisiensi penggunaan sumber daya alam terutama saluran irigasi sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Sehingga penambahan indeks tanam yang tadinya hanya bisa sekali setahun, menjadi dua kali atau lebih. Dengan meningkatnya jumlah produksi tentunya diharapkan tercapainya kecukupan pangan, peningkatan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki kualitas dan daya saing harga yang mampu mengundang investor lokal untuk mengambil pasokan bahan pokok dan menjadikan wilayah tersebut sebagai penghasil padi yang cukup baik.

### 3) Pembangunan Plat Dekker

Plat Dekker merupakan pembatas jembatan dengan pinggir got, sungai atau irigasi yang berfungsi mengaliri air hujan ke aliran sungai melalui drainase. Program pembangunan ini sangat membantu masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Dahulu sebelum pembangunan ini dimulai, jika terjadi hujan, air yang tergenang di badan jalan terus merusak jalan hingga rusak berlubang dan mengganggu aktivitas keseharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan adanya infrastruktur ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan jalan pada saat hujan, air yang tadinya tergenang di jalan akan

dialirkan melalui drainase, maka mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya berjalan dengan baik sehingga tercapainya infrastruktur yang layak bagi masyarakat.

Dari ketiga pembangunan infrastruktur di atas dapat kita lihat membawa perubahan, sebelum adanya pembangunan infrastruktur ini daya saing daerah sangat lemah, ditinjau dari lapangan mulai dari infrastruktur yang kurang memadai, hasil dari sumber daya alam yang kurang digarap dengan baik sehingga pendapatan masyarakat juga rendah. Pembangunan jalan sekarang dalam kondisi yang cukup memadai, peningkatan tata kelola pemerintah melalui peningkatan pendapatan daerah dari hasil pertanian dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan yang dapat meningkatkan daya saing serta mampu bersaing dengan daerah lain.

Salah satu faktor yang menunjang daya saing daerah adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur bisa dicapai melalui pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, dimana segala aspek masyarakatnya dituntut untuk menjaga ketertiban dan tanggung jawab dengan partisipasi aktif yang didasarkan atas inisiatif masyarakatnya untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik dan mendorong kegiatan dengan respon dan antusias yang terjamin.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang daya saing daerah di desa Buntu Karya yang telah berjalan dan dilaksanakan selama ini memiliki potensi cukup baik dalam pembangunan infrastruktur. Terbukti dengan kemajuan pembangunan dalam bidang infrastruktur. Namun terkadang terdapat dusun yang terhambat dalam program pembangunan ini diantaranya dusun Kaccanning dan dusun Sompu karena anggaran yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Buntu Karya dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian untuk indikator kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah disosialisasikan dalam musyawarah desa., dikatakan baik karena sudah mencapai keberhasilan pada program tersebut. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

Pembangunan Desa Buntu Karya bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang menfokuskan pada infrastruktur apa yang sangatt dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan seperti infrastruktur jalan tani sehingga pada tahap pembangunan selanjutnya bisa

berjalan lancar tanpa menjadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini dijadikan permasalahan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap daya saing daerah karena kedepannya infrastruktur akan lebih baik lagi.

Dari ketiga pembangunan infrastruktur ini dapat kita lihat membawa perubahan yang baik seperti jalan dalam kondisi yang lebih baik, peningkatan tata kelola pemerintah melalui peningkatan pendapatan daerah dari hasil pertanian dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan yang dapat meningkatkan daya saing serta mampu bersaing dengan daerah lain.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu saran penelitian masing-masing indikator seperti beberapa masih harus diperhatikan khususnya program terlaksana, kemudian untuk sosialisasi program semestinya dapat lebih diberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Bupati Luwu diharapkan agar turut mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Buntu Karya. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah Daerah, akan meminimalisir adanya kesalahan dan penyelewengan anggaran.
2. Kepada Perangkat Desa Buntu Karya dalam hal ini Kepala Desa Buntu Karya agar transparan dalam pembangunan infrastruktur. Serta menjaga

dan memelihara fasilitas umum yang telah diselesaikan. Kepada peneliti selanjutnya agar memasukkan variable lain yang mungkin berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Buntu Karya seperti tingkat pendidikan, jumlah anggaran dan fasilitas umum, serta menambahkan atau mengubah lokasi penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2017.
- Aprianingsih, Ayu, *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan (Studi Pada Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.  
<http://repository.ummat.ac.id/1784/4/COVER-BAB%20III.pdf>
- Arikunto Suharmisi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Arikunto, Suhaini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014
- Bintaro R, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1983.
- Budiharsono.p, *Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Region Banding Institute Bogor, 2015.
- Data Profil Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu
- Devania Annesa, "Wawancara Mendalam (*indepht interview*)" dalam <http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm>, diakses tanggal 28 Februari 2022.
- Febriyanti, Tiyas, *Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi DiBinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*
- Fhatoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cetakan ke 2 Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.  
<http://repository.radenintan.ac.id/14018/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>
- G. Suharto, Didik, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 218-2019

Juma'in, *Panduan Indeks Daya Saing Daerah*, Jakarta, 2020Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan terjemahan*, Bandung:

CV Penerbit Diponegoro, 2003.

Lestari, Mega dan Suhadak, "*Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Ekonomi Indonesia*", JurnalAdministrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 70, NO. 1, 2019.  
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/2919/3205>

Marengokonda, Yulani, Welson Y.Rompas dan Rully Mambo, *Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/23832/23458>  
2

Maschap, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Polgov, Fisipol Ugm, Yogyakarta, 2013.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Narbuko, Cholid, Abu Achmad, *Metode Penelitian* Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2013.

Nopita, Joyesi, "*Impelementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten*

*KuantanSiangingi”*,

<http://www.journal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/download/1259/866>

NSS, Rr Lulus Prapti, *”Analisis Pembangunan Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Ekonomi Rakyat”*, Semarang: J. Dinamika Sosbud). Vol 17, No. 2.  
<https://journal2.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/505/307>

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

P.JZoedmulder Bekerja Sama Dengan S.O.Robson, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Pratama, Anda, *”Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”* (Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah), (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).  
[http://repository.uinjambi.ac.id/1823/1/SIP151926\\_ANDA%20PRATA\\_MA\\_IP%20-%Rizal%20muhammad.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/1823/1/SIP151926_ANDA%20PRATA_MA_IP%20-%Rizal%20muhammad.pdf)

Puji, Endah, DKK, *Op. Cit.*

Porter, M.E, *Strategi Bersaing (Compotitive Strategi)*, Karisma, Tangerang, 2007

Rosita, Ayu, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.  
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13148-full_Text.pdf)

Sangarimbun, Mastri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995.

Siagian, Sondang P, *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Rineka Cipta: Jakarta 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke 14 Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharto G. Didik, *Membangun Kemendirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Sukanto, “*Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 7, No. 2, Desember 2016.  
<http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/download/4879/2626>

Sulistijo S M, Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Kontruksi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Surachman Winarno, *Desain Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1997

Tim Pengurus RPJM Desa, “*Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana pembangunan jangka menengah)*”, desa Buntu Karya, 2016-2021.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Tjokroadmidjojo, Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

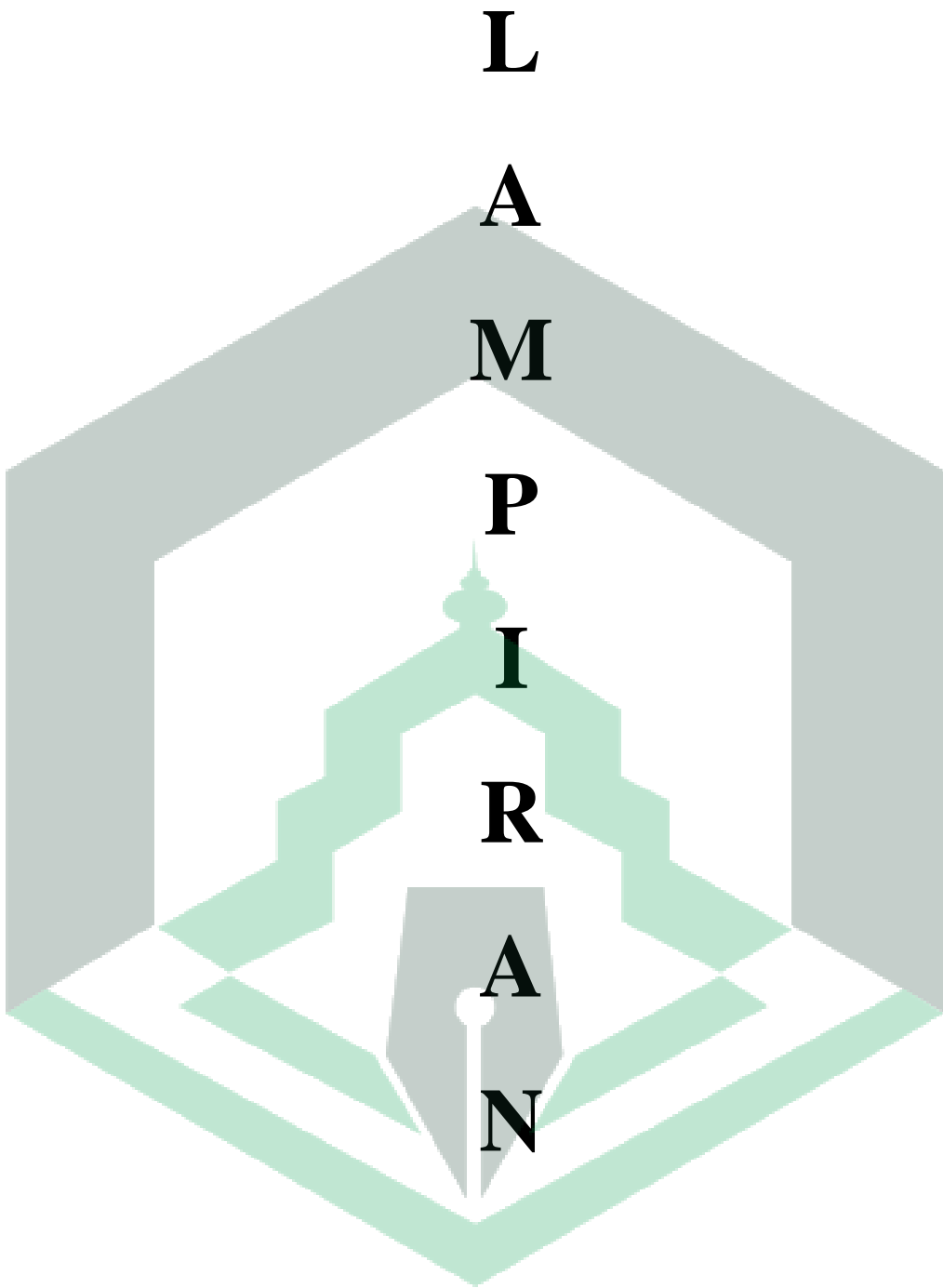
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pada Pasal 1 Ayat 23

Watung, Jesika, Wilson Y.Rompas dan Deisi Tampongangoy, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkowan Barat Kabupaten Minahasa*, JAP.No.107,(Vol.VII),2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35065/32947>

Wiratna, Sujarweni V, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.







## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan peneliti pada penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Daya Saing Daerah.

### I. Identitas Responden

1. Nama Informan
2. Jenis Kelamin
3. Umur
4. Status Pekerjaan
5. Alamat Wawancara
6. Tempat Wawancara

### II. Daftar Pertanyaan Wawancara

Indikator Efektivitas Richard M. Sterss	Indikator Wawancara	Contoh Pertanyaan
1. Pencapaian Tujuan	Pelaksanaan kegiatan terselesaikan dalam kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa lamakah kurun waktu pembangunan infrastruktur itu dibuat?</li> <li>2. Siapakah penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut?</li> </ol>
2. Integrasi	Komunikasi dan sosialiasi dalam pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam pengambilan keputusan masyarakat dilibatkan?</li> <li>2. Apa sajakah kendala yang dihadapi selama proses pembangunan infrastruktur tersebut?</li> </ol>
3. Adaptasi	Masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dengan dilaksanakannya pembangunan</li> </ol>

	pembangunan infrastruktur.	infrastruktur dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat?
--	----------------------------	--

### **SURAT IZIN PENELITIAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 63/PENELITIAN/10.13/DPMTSP/III/2022  
 Lamp : -  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Ka. Desa Buntu Karya  
 di -  
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : B104/In.19/FEBI.04/KS.02/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rika Salma  
 Tempat/Tgl Lahir : Rewang / 20 November 1998  
 Nim : 17 0401 0034  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Alamat : Dsn. Rewang  
 Desa Buntu Karya  
 Kecamatan Ponrang Selatan

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG DAYA SAING DAERAH DI DESA BUNTU KARYA KECAMATAN PONRANG SELATAN KABUPATEN LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **DESA BUNTU KARYA**, pada tanggal **01 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 7 3



Ditetapkan di Kabupaten Luwu  
 Pada tanggal : 01 Maret 2022  
 Kepala Dinas,



**Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA**  
 Rangkap : Pembina Tk. I IV/b  
 NIP. : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Rika Salma;
5. Arsip.

**DOKUMENTASI**



Dok: Pembentukan/pembangunan/Pengerasan Jalan tani



Dok: Pembangunan Saluran Irigasi Tersier



Dok: Wawancara Kepala Desa Buntu Karya



Dok: Wawancara Sekertaris Desa Buntu Karya



Dok: Wawancara Kaur Perencanaan dan Umum Desa Buntu Karya



Dok: Wawancara Kepala Dusun Rewang Desa Buntu Karya



Dok: Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Buntu Karya



Dok: Wawancara Masyarakat/Petani Desa Buntu Karya

## RIWAYAT HIDUP



**Rika Salma**, Lahir di Buntu Karya, 20 November 1998, Penulis merupakan anak ke dua dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Abdul Hamid dan ibu yang bernama Jumiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Rewang Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di Sekolah Dasar MIN 01 Buntu Batu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTs.SA Buntu Batu hingga tahun 2013. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bua Ponrang. Setelah Lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), selain aktif dalam bidang akademik penulis juga pernah berkecimpung di organisasi ekstra dan intra kampus.